



PERAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Farah Sabilatul Jannah¹, Holifah², Musrifa³

Universitas Nurul Jadid, Fakultas Sosial dan Humaniora, Kabupaten
Probolinggo ^{1,2,3}

Email: Farah2405jannah@gmail.com¹, hlfhivha@gmail.com²,
musrifa1764@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Human Development Index (HDI) dimensions, such as health, education, and per capita expenditure, on poverty levels and income inequality (Gini Index) in Probolinggo Regency. Although regional economic development in 2020-2024 shows a positive trend, with the HDI of Probolinggo Regency increasing by an average of 0.75%, the issues of poverty and income inequality remain major challenges. Limited access to education and health services in some areas has resulted in low productivity and increased economic inequality. This study utilizes a descriptive quantitative approach to analyze the influence of each HDI dimension on poverty and the Gini Index. The results of this study are expected to serve as a reference for local governments in formulating more efficient and sustainable development policies to reduce poverty and promote economic equality in Probolinggo Regency.

Keywords : Human Development Index, Poverty, Income Inequality.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita, terhadap tingkat kemiskinan serta ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) di kabupaten probolinggo. Walaupun perkembangan ekonomi wilayah pada tahun 2020-2024 menunjukkan arah yang positif, dimana IPM Kabupaten Probolinggo rata-rata meningkat 0,75%. Isu kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan masih menjadi tantangan utama. Keterbatasan dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah berpengaruh pada rendahnya produktivitas serta meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi. Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengaruh setiap dimensi IPM terhadap kemiskinan dan Indeks Gini. Hasil penelitian

diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan serta mendorong pemerataan ekonomi di Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Ketimpangan pendapatan.

PENDAHULUAN

Dalam sudut pandang ekonomi pembangunan, kualitas manusia dinilai melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah representasi yang menyeluruh mengenai derajat pengembangan sumber daya manusia di suatu area, yang menggambarkan hasil dari beragam usaha pengembangan di wilayah tersebut (Y. Yulianti & Qomariah, 2025). IPM tidak hanya sekedar angka statistik, melainkan merupakan tolak ukur investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering dipandang sebagai indikator yang sangat terkait dengan tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Standar hidup yang layak) (Herlambang & Rachmawati, 2023). Perbedaan pencapaian IPM antarwilayah mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah tertentu (Aisyah et al., 2023).

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah tantangan struktural yang saling berkaitan dalam pembangunan wilayah, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kapasitas manusia dalam memutus rantai keduanya. Di Kabupaten Probolinggo, sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang penting di Jawa Timur dengan didukung oleh sektor pertanian, pariwisata, serta industri yang besar tetapi masih mengalami ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan penghasilan, peningkatan IPM diharapkan dapat mendorong pergerakan sosial dan pemerataan ekonomi. Ketimpangan pendapatan di daerah ini juga menunjukkan pembagian sumber daya yang tidak seimbang, terutama di antara petani dan UMKM. Pada level nasional dan daerah, peningkatan IPM tidak hanya menurunkan kemiskinan absolut tetapi juga mengurangi ketimpangan dengan mendorong partisipasi ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen, di mana kemampuan individu menjadi dasar untuk melarikan diri dari jebakan kemiskinan antargenerasi (A. Yulianti, 2020).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) Kabupaten Probolinggo, selama periode 2020-2024, rata-rata IPM Kabupaten Probolinggo naik sebesar 0,75

persen. Peningkatan IPM 2024 terjadi di seluruh dimensi, meliputi umur panjang dan kesehatan, pendidikan, serta kualitas hidup yang baik. Walaupun semua dimensi yang membentuk IPM mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhan IPM 2024 menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam dimensi umur panjang dan kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan dapat hidup hingga 73,93 tahun, meningkat 0,13 tahun jika dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) untuk penduduk berumur 7 tahun bertambah 0,01 tahun, dari 12,63 tahun (2023) menjadi 12,64 tahun (2024). Rata-rata lama sekolah (RLS) untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun, dari 6,29 tahun (2023) menjadi 6,31 tahun (2024). Dimensi standar kehidupan yang pantas yang dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang telah disesuaikan) mengalami kenaikan sebesar 502 ribu rupiah (4,27 persen) dibandingkan tahun lalu. Data sumber pengeluaran riil per kapita per tahun diperoleh dari Susenas Maret 2024.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan selalu berkaitan dengan perubahan situasi menuju keadaan yang lebih baik di bandingkan sebelumnya. Hal ini tidak sepenuhnya salah bahkan cenderung mengandung arti yang positif, yaitu suatu kemajuan dan masa depan yang lebih baik. Berbagai interpretasi juga diajukan dengan berbagai alasan yang dapat mengarahkan pada anggapan bahwa pembangunan selalu menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, era globalisasi dan komunikasi seolah-olah menghubungkan pengertian tersebut. Kadang kenaikan pendapatan per kapita atau produk domestik bruto (PDB selalu dapat digunakan sebagai tolak ukur kemajuan, meskipun seringkali ketidaksetaraan sosial juga sering menyertai pembangunan ketika yang terjadi malah ketidakmerataan penyalurannya. Kemiskinan contohnya, merupakan salah satu bentuk kesenjangan yang terletak di antara fase-fase pembangunan. Lalu apa sesungguhnya kemampuan sebagai elemen krusial yang harus dimiliki dalam tahap pengembangan, sedangkan kemajuan ekonomi yang selalu menjadi simbol dalam pembangunan, cenderung tidak dapat berdiri sendiri tanpa menghasilkan kebebasan, pemerataan distribusi, serta hak asasi manusia.

Pengertian kapabilitas menurut Amartya Sen mengartikan “kapabilitas” menurut (Michael P. Todaro, 2003:24) berarti “kebebasan yang dimiliki individu dalam konteks pemilihan fungsi, dilengkapi dengan karakteristik-karakteristik pribadi yang dimilikinya (transformasi karakteristik menjadi berfungsi), dan penguasaan yang dimilikinya terkait komoditi”. Pembangunan yang berlandaskan pada kebebasan dan demokrasi akan menciptakan kesejahteraan sosial, sehingga dapat terhindar dari kemiskinan yang meluas atau setidaknya dapat pulih kembali dengan lebih cepat, yang akhirnya akan mendorong perubahan sosial. Pembangunan yang berlandaskan pada kebebasan dan demokrasi akan

menciptakan kesejahteraan sosial, agar terlepas dari kemiskinan. Massal atau setidaknya dapat kembali dengan lebih cepat, yang pada akhirnya akan terjadi transformasi sosial. Pembangunan sosial sebagai sebuah paradigma dan beragam sudut pandang di dalamnya adalah pola pembangunan manusia. Berdasarkan paradigma pembangunan manusia, sasaran utama dari pembangunan adalah menghasilkan sebuah atmosfer yang memungkinkan komunitasnya untuk merasakan hidup yang inovatif, sehat dan berumur panjang. Pendapatan hanyalah alat, sedangkan tujuan akhir dari pembangunan haruslah individu itu sendiri (Indarti, 2017).

Dalam buku (Judijanto et al., 2025) diperkenalkan oleh UNDP, IPM menyatukan tiga dimensi utama:

- a. Kesehatan (dinilai melalui angka harapan hidup pada saat lahir)
- b. Pendidikan (diukur dengan nilai rata-rata dan harapan lama sekolah)
- c. Standar hidup layak (diukur melalui pendapatan nasional bruto per orang)

2. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi. Tinggi dan rendahnya tingkat kemiskinan di suatu daerah sangat terkait dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada setiap fase pembangunan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Standar kualitas hidup minimum (Nugroho, 1995) masalah tingkat kehidupan yang rendah juga terkait dengan jumlah penghasilan yang minim, kondisi kesehatan yang tidak baik, tempat tinggal yang tidak memadai dan pendidikan yang rendah. Dalam pernyataan Nugroho (2015), badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan keadaan yang serba kekurangan yang muncul bukan karena keinginan oleh orang yang tidak beruntung, tetapi tidak bisa terhindarkan dengan kekuatan yang dimilikinya. Umumnya kekurangan ekonomi adalah situasi di mana tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, busana, tempat tinggal, kesehatan, dan pengajaran.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse pada tahun 1953. Lingkaran setan kemiskinan merupakan serangkaian faktor yang saling berkaitan, sehingga menciptakan keadaan di mana suatu negara, khususnya negara berkembang, menghadapi banyak tantangan dalam mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik (Kuncoro, 2006). Keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia yang tampak dari rendahnya pendidikan, ketidaksempurnaan pasar, serta minimnya modal berakibat pada rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang mereka terima menjadi rendah. Pendapatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya tabungan dan investasi. Kurangnya investasi berdampak pada minimnya akumulasi modal, yang mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan

pendapatan yang rendah dan berujung pada kemiskinan serta masalah lainnya. Pemikiran Logis yang diungkapkan oleh Ragnar Nurkse, seorang ekonom pembangunan terkenal, pada tahun 1953 yang menyatakan "*sebuah negara miskin adalah miskin, karena ia miskin*" (Goni et al., 2022).

3. Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu atau keluarga di suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan yang sangat besar dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi, merusak serta melemahkan stabilitas dan solidaritas sosial, serta dianggap tidak adil. Untuk menilai ketimpangan pendapatan terdapat beberapa metrik. Distribusi pendapatan adalah indikator kemiskinan relatif yang harus diperhatikan dan dihitung nilainya dengan empat ukuran yaitu koefisien gini pendapatan, ukuran Bank Dunia, indeks Theil, dan indeks-L (BPS, 2018). Distribusi pendapatan dapat diukur melalui pendekatan belanja rumah tangga yang datanya diperoleh dari Susenas (Khasanah, 2021). Indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan ini adalah Koefisien Gini (Rasio Gini atau Gini Ratio). Teori koefisien Gini dirumuskan oleh Corrado Gini, seorang statistikawan asal Italia, pada tahun 1912. Hingga kini, rasio gini kerap dipakai untuk melukiskan tingkat ketidaksetaraan (Maarif, 2023). Koefisien Gini merupakan angka statistik yang menunjukkan derajat ketimpangan pendapatan, dengan nilai antara 0 (merata sempurna) sampai 1 (ketimpangan total). Rasio Gini diperoleh dari Kurva Lorenz, yang adalah grafik distribusi akumulasi pendapatan atau kekayaan. Jika nilai koefisien gini mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan berlangsung merata.

Secara umum, ketimpangan ini disebabkan oleh interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah (Subrata, 2018). Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan:

1. Pertumbuhan Penduduk yang Pesat: Pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol sering kali mengurangi pendapatan per kapita dan memberi tekanan pada sumber daya yang terbatas.
2. Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia: Perbedaan akses ke pendidikan yang baik mengakibatkan jurang dalam keterampilan. Pekerja berpendidikan tinggi biasanya mendapatkan gaji jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja tidak terampil.
3. Kesehatan: Tingkat harapan hidup dan belanja kesehatan yang rendah di sebuah daerah bisa menghalangi produktivitas warga, yang pada gilirannya memperbesar kesenjangan ekonomi.
4. Pembangunan yang Tidak Seimbang: Konsentrasi pembangunan yang terbatas pada kota-kota besar atau area tertentu (seperti pulau Jawa dibandingkan luar Jawa) mengakibatkan ketidaksetaraan antar daerah.

5. Pengangguran: Tingginya tingkat pengangguran terbuka secara langsung berdampak pada jumlah penduduk yang tidak memperoleh penghasilan, sehingga memperburuk perbandingan ketimpangan.
6. Terbatasnya Mobilitas Sosial: Kesulitan bagi individu untuk naik ke kelas ekonomi yang lebih tinggi akibat kurangnya akses terhadap modal atau jaringan sosial.

METODE PENELITIAN

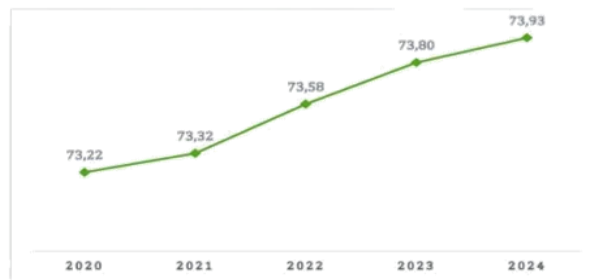
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif serta menggunakan metode analisis data sekunder. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara sistematis pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kaitannya dalam memutus siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan pendapatan di Kabupaten Probolinggo. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis data angka terkait indikator kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk memahami sejauh mana kualitas sumber daya manusia berperan dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan ekonomi di kawasan tersebut.

Data yang digunakan dalam studi ini bersumber dari data sekunder, seperti laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian sebelumnya, serta publikasi resmi dari pemerintah Kabupaten Probolinggo yang berkaitan. Seluruh data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif melalui perhitungan tren pertumbuhan, perbandingan hasil indikator antar periode, serta penafsiran angka-angka tersebut untuk mengonfirmasi efektivitas IPM di lapangan. Dengan analisis ini, diharapkan bisa didapatkan pemahaman yang objektif dan mendalam tentang peran strategis pengembangan manusia dalam menghadapi dinamika kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Profil IPM Kabupaten Probolinggo

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), nilai IPM Kabupaten Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang stabil, meskipun tetap di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur, yakni berada di posisi kelima terendah di Jawa Timur pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.



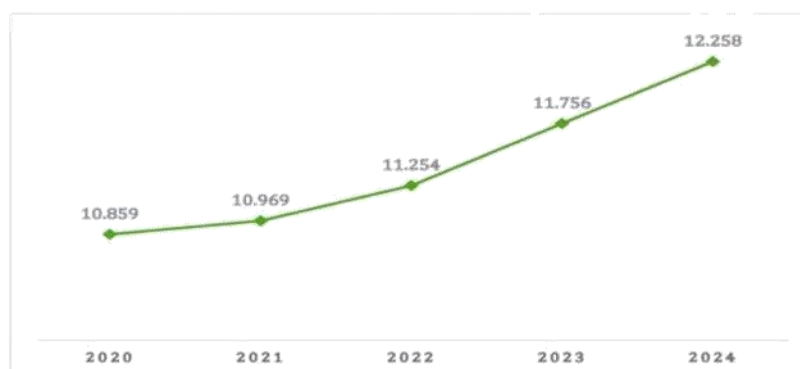
Gambar 1. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Data mengenai Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang positif yang mencerminkan perbaikan pada aspek umur panjang dan kesehatan masyarakat setempat. Dalam periode empat tahun itu, terjadi peningkatan keseluruhan sebesar 0,71 tahun dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,24 persen per tahun. Secara spesifik, jika di tahun 2020 angka UHH berada di level 73,22 tahun, maka di tahun 2024 angka itu berhasil mencapai 73,93 tahun. Meski ada kenaikan sebesar 0,13 tahun atau sekitar 0,18 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, tampak adanya tren perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan dengan rata-rata kenaikan tahunan pada periode 2020-2023 yang pernah mencapai angka 0,26 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas kesehatan dan harapan hidup terus meningkat, percepatan kemajuannya mulai mengalami sedikit penurunan di tahun terakhir periode tersebut.



Gambar 2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Probolinggo Tahun 2020-2024

Data ini menggambarkan bahwa ukuran standar kehidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, diukur melalui pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan, menunjukkan kemajuan yang sangat baik pada tahun 2024. Dengan pencapaian Rp12,258 juta per tahun, terdapat pertumbuhan yang cukup berarti yaitu sebesar 502 ribu rupiah atau sekitar 4,27 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan pada tahun 2024 ini sangat mengesankan karena melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode 2020-2023 yang hanya mencapai 2,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan beli dan keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo mengalami percepatan pemulihan atau peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan tren beberapa tahun terakhir, yang pada akhirnya memberikan kontribusi penting bagi penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.



Gambar 3. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Probolinggo (Ribu Rupiah) 2020-2024

Data tersebut menunjukkan bahwa ukuran standar hidup yang layak bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo, yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan, mengalami perkembangan yang sangat baik pada tahun 2024. Dengan pencapaian sebesar Rp12,258 juta per tahun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 502 ribu rupiah atau pertumbuhan sekitar 4,27 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan di tahun 2024 ini termasuk mengesankan karena melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan pada periode 2020-2023 yang hanya sebesar 2,69 persen. Ini menunjukkan bahwa daya beli dan keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo mengalami percepatan pemulihan atau peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan tren beberapa tahun sebelumnya, yang pada akhirnya memberikan sumbangan penting dalam penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.

2. Mekanisme IPM Menutup Rantai Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerapkan strategi pengurangan kemiskinan yang sangat menyeluruh dengan menjadikan reformasi birokrasi sebagai dasar utamanya. Penekanan pada peningkatan tata kelola ini bertujuan untuk membangun sistem penanggulangan yang lebih efisien dan transparan, di mana kemampuan sumber daya manusia di tingkat birokrasi ditingkatkan dalam memvalidasi data agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling memerlukan. Langkah ini selanjutnya diperluas melalui skema kolaborasi antar sektor yang melibatkan pihak swasta serta lembaga vertikal. Melalui kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR), pemerintah daerah bisa menutupi kekurangan pendanaan yang tidak tercakup oleh APBD, sementara kerja sama dengan instansi vertikal menjamin sinkronisasi kebijakan dari pusat hingga daerah. Kolaborasi kolektif ini berfungsi sebagai pendorong utama dalam mencapai sasaran ambisius bupati untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai tingkat satu digit. Sebagai langkah konkret di lapangan, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimasukkan ke dalam strategi itu untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara langsung. Perbaikan tempat tinggal ini tidak hanya dianggap sebagai bantuan fisik semata, tetapi juga sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dengan tinggal di rumah yang layak, diharapkan produktivitas masyarakat meningkat, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga secara mandiri dan berkelanjutan (Rochim, 2025).

Selain kemiskinan, IPM juga berkontribusi dalam memengaruhi ketidaksetaraan pendapatan yang dinilai melalui Indeks Gini. Peningkatan IPM dapat meningkatkan ketimpangan dengan memperluas akses pendidikan dan kesehatan secara merata, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih adil. Namun di Kabupaten Probolinggo, ketidakmerataan pendapatan masih berlangsung karena adanya perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama antara daerah pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Probolinggo Gini Rasio tahun 2024 sebesar 0,339. Ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang masih dikuasai oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi biasanya mengalami peningkatan pendapatan yang lebih cepat, sedangkan kelompok berpendidikan rendah ketinggalan. Keadaan ini memperbesar jurang ekonomi meskipun secara keseluruhan IPM menunjukkan peningkatan.

Oleh karena itu, peningkatan IPM harus difokuskan tidak hanya pada angka indeks yang dicapai, tetapi juga pada pemerataan mutu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pernyataan ini sejalan dengan teori kapabilitas Amartya Sen yang

menekankan bahwa pembangunan manusia perlu meningkatkan kebebasan serta kemampuan individu untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Probolinggo untuk periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 0,75 persen. Peningkatan ini dipicu oleh kemajuan di semua bidang utama, yaitu kesehatan dengan peningkatan umur harapan hidup, pendidikan lewat bertambahnya lama sekolah, dan standar hidup yang baik yang ditunjukkan oleh peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terbukti dengan berkurangnya persentase penduduk miskin menjadi 16,45 persen pada tahun 2024 melalui berbagai strategi terpadu seperti reformasi birokrasi, kerjasama lintas sektor, dan peningkatan infrastruktur dasar masyarakat.

Namun, tantangan besar masih ada karena meskipun angka kemiskinan menurun secara kuantitatif, Kabupaten Probolinggo tetap berada di posisi keempat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Di samping itu, kenaikan IPM belum sepenuhnya dapat menghilangkan ketimpangan pendapatan, yang terlihat dari nilai Gini Ratio sebesar 0,339 karena perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi antara kawasan pedesaan dan perkotaan serta dominasi sektor ekonomi dengan nilai tambah rendah. Dengan demikian, pengembangan manusia di masa depan perlu lebih diarahkan pada pemerataan kualitas layanan dan peningkatan kemampuan individu supaya setiap lapisan masyarakat memiliki kebebasan serta potensi yang setara untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan ketidakadilan secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). PENGARUH HUBUNGAN ANTARA KETIMPANGAN PENDAPATAN , PENGURANGAN KEMISKINAN DAN INDONESIA. *ECONOMINA*, 2, 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo 2024*. Bps.Go.Id.
- Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 121–132.
- Herlambang, B., & Rachmawati, N. S. A. (2023). PENGARUH PDRB, IPM, DAN

- JUMLAH PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR. *Ekonomi Dan Bisnis*, 27(1), 52–60.
- Indarti, S. H. (2017). PEMBANGUNAN INDONESIA DALAM PANDANGAN AMARTYA SEN. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3, 35–50.
- Judijanto, L., Yuliani, T. W., Nopiah, R., Kusumastuti, Y., & Chaniago, N. (2025). *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* (Efitra (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=KhJeEQAAQBAJ>
- Khasanah, L. (2021). *Dampak Ketimpangan Pendapatan , Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. 1, 75–81. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156>
- Rochim, M. (2025). *Percepat Pengentasan Kemiskinan, Pemkab Probolinggo Libatkan Swasta Tuntaskan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*. Pantura7.Com. <https://www.pantura7.com/2025/12/15/percepat-pengentasan-kemiskinan-pemkab-probolinggo-libatkan-swasta-tuntaskan-perbaikan-rumah-tidak-layak-huni/#:~:text=Probolinggo bisa terus ditekan%2C dengan target angkanya,komprehensifnya untuk mengentaskan kemiskinan%2C terutama kemiskinan ekstrem>
- Subrata, B. A. Y. (2018). *MEMPENGARUHI KETIMPANGAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR*. 1–13.
- Yulianti, A. (2020). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Periode Tahun 2010-2019*. Bappeda.Babelprov. <https://bappeda.babelprov.go.id/artikel?created=&title=Pengaruh+Indeks+Pembangunan+Manusia+%28IPM%29+Dan+Pertumbuhan+Ekonomi+Terhadap+Kemiskinan+Kabupaten%2FKota+Di+Provinsi+Kepulauan+Bangk>
- Yulianti, Y., & Qomariah, S. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 5, 190–200.